

Nomor : 638/WK/CORSEC/2021

Jakarta, 24 September 2021

**Kepada Yth.
Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan**

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta

**Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Laporan
Keuangan *Audited* Per 30 Juni 2021
PT Waskita Karya (Persero) Tbk**

Dengan Hormat,

Guna memenuhi peraturan No. IX.C.11 lampiran keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-712/BL/2006 tanggal 26 Desember 2012 dan peraturan BEI No. I-E. IV.5, bersama ini kami sampaikan bukti iklan laporan keuangan *audited* per 30 Juni 2021 PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Pemasangan iklan laporan keuangan *audited* per 30 Juni 2021 PT Waskita Karya (Persero) Tbk tersebut telah dilakukan pada tanggal 24 September 2021 pada media Investor Daily sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

**Senior Vice President
Corporate Secretary,**

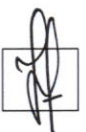


Ratna Ningrum

Lampiran: 1 Berkas

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Board of Director PT Waskita Karya (Persero) Tbk.



PEMULIHAN EKONOMI BISA TERHAMBAT

Daerah Keteteran Realisasikan Belanja

Oleh Arnoldus Kristianus

JAKARTA - Realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) hingga 31 Agustus 2021 tercatat Rp 537,9 triliun atau baru 44,2% dari pagu yang sebesar Rp 1.217,7 triliun dan hanya tumbuh 1,97% secara year on year (yoy). Sementara realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) tercatat Rp 1.087,9 triliun atau 55,7% dari pagu yang sebesar Rp 1.954,5 triliun dan tumbuh 10,9% (yoy).

Akibat dari rendahnya belanja APBD tersebut, total dana pemerintah daerah (pemda) yang masih tersimpan di perbankan mencapai Rp 178,95 triliun atau naik sebesar Rp 5,22 triliun (3,01%) dari posisi Juli 2021. Namun, jika dibandingkan dengan posisi Agustus 2020, terjadi penurunan hingga Rp 48,19 triliun atau 21,2%.

Menyikapi realisasi belanja (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, persentase realisasi belanja daerah tersebut juga masih jauh di bawah realisasi pendapatan APBD yang mencapai 53,7%. Walaupun realisasi pendapatan, termasuk pendapatan dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) cukup tinggi, hal ini tidak dibarengi dengan realisasi belanja yang tinggi pula.

"Ada daerah yang jumlah realisasi pendapatan dan belanjanya mendekati. Mereka (daerah) belanjakan karena mayoritas berasal dari transfer ke daerah. Kalau kita lihat ada daerah yang pendapatan dari transfer cukup besar tetapi belanjanya masih rendah," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KTTs (Kinerja dan Fakta) di Jakarta, Kamis (23/9).

Menkeu mengungkapkan, selisih antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja tertinggi terjadi di wilayah Banten (19,7%) dan terendah di wilayah Jawa

Tengah (-0,63%). Jawa Tengah menjadi satu-satunya wilayah dengan realisasi belanja lebih tinggi daripada realisasi pendapatan. Realisasi belanja yang relatif rendah mengindikasikan belanja yang belum optimal dan turut berdampak pada tingginya nilai simpanan pemda di perbankan.

"Mayoritas jumlah belanja pemerintah daerah lebih rendah dari yang ditransfer. Saat belanjanya sudah kita mintakan dengan tata kelola dengan persyaratan salur, mereka tidak langsung belanjakan. Sampai akhir Agustus, jumlah belanjanya masih di bawah jumlah yang mereka terima," tutur Sri Mulyani.

Menurut Menkeu, simpanan pemda pada Agustus 2021 mengalami kenaikan dan nilainya masih cukup tinggi. Bahkan, masih terdapat provinsi dengan nilai simpanan yang lebih besar dibandingkan nilai operasional tiga bulan ke depan. "Adapun saldo rata-rata di akhir tahun selama tiga tahun terakhir sebesar Rp 96 triliun," ucap dia.

Selisih tertinggi antara nilai simpanan dan biaya operasional tiga bulan adalah di Jawa Timur (Rp 9,9 triliun), Aceh (Rp 4,3 triliun), dan Jawa Tengah (Rp 4,2 triliun). Terendah di DKI Jakarta (Rp 2,5 triliun), Lampung (Rp 1,1 triliun), dan Nusa Tenggara Barat (Rp 900



Harga Telur Ayam Turun

Pekerja mengambil telur ayam di Desa Sindangrasa, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis (23/9/2021). Akibat harga jual telur yang terus mengalami penurunan menjadi Rp 15.500 per kilogram dan diperparah dengan harga pakan mencapai Rp 6.000 per kilogram, peternak terpaksa menjual ayam kalungnya untuk menutupi biaya produksi.

Table titled 'Belanja APBD per Fungsi (triliun Rupiah)' comparing August 2020 and August 2021 data across categories like Pendapatan, Kesehatan, and Pendidikan.

penurunan karena ini didominasi oleh pusat. "Kami melakukan intercept sehingga kecepatan untuk vaksinasi dan penanganan Covid melalui PKM tidak terkendala. Namun, kami tetap mendorong insentif nakes dibayarkan tepat waktu," ucap Sri Mulyani.

Secara terpisah, peneliti Center of Reform and Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilef

mengatakan, pekerjaan rumah pemerintah pusat dan daerah saat ini yaitu mendorong realisasi belanja bisa lebih cepat lagi. Sebab, tahun anggaran 2021 tinggal tersisa empat bulan lagi.

"Artinya di sisa tahun ini pos belanja baik itu di level pusat maupun daerah harus didorong. Memang kalau melihat dari realisasi APBN sebenarnya pekerjaan rumah yang agak lebih banyak di daerah," ucap Yusuf saat dihubungi pada Kamis (23/9) malam.

Menurut dia, pemerintah daerah harus menggerakkan segala kemampuan untuk mendorong realisasi anggaran belanja. Tidak hanya realisasi belanja rutin, namun juga belanja insentif yang termasuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). "Peran perangkat daerah dan tim penganggaran di daerah harus ditingkatkan untuk memastikan realisasi belanja, khususnya PEN bisa lebih cepat," pungkas Yusuf.

BI: Pemerintah Siapkan Insentif Dorong Pemanfaatan Mata Uang Lokal

JAKARTA - Kepala Departemen Internasional Bank Indonesia (BI) Dody Dzulverdi mengatakan, pemerintah sedang merancang insentif untuk pelaku usaha yang memanfaatkan kerja sama penyelesaian transaksi bilateral dengan mata uang lokal atau local currency settlement (LCS).

"Secara eksplisit, pemerintah mengatakan akan memberikan kemudahan fasilitas dan insentif, dalam konteks fasilitas ekspor dan impor, untuk mendorong minat pelaku usaha dalam memanfaatkan LCS," kata Dody dalam webinar 'Dampak Penetapan LCS Diperluas, Bagaimana Nasib Rupiah?' di Jakarta, Kamis (23/9).

Di samping itu, BI akan menggerakkan kampanye secara komprehensif kepada pelaku usaha, termasuk melalui pendekatan dengan menasar pelaku usaha spesifik.

Menurut Dody, peningkatan pengetahuan pelaku usaha menjadi penting karena berdasarkan survei BI, sebanyak 80% dari responden mengatakan belum mengetahui LCS.

BI juga akan merealisasikan pengaturan LCS yang masih memberikan peluang usaha lain dengan tetap memperhatikan risiko. BI antara lain akan memperluas cakupan transaksi LCS.

"Memang betul saja kerja sama dengan Malaysia dan Thailand, LCS diterapkan untuk perdagangan barang dan jasa, tapi juga usaha memandang perlu diperluas untuk foreign direct investment, income transfer, dan remitenansi," terang Dody seperti dikutip Antara.

BI juga sedang mengkaji ketentuan threshold underlying LCS yang dirasa memberikan peluang usaha, menyederhanakan format transaksi LCS, dan menambah bank Approve Cross Currency Dealers (ACCD) yang dapat melaksanakan LCS.

Dengan beragam keuntungan menerapkan LCS, Dody pun meyakini pelaku usaha akan tertarik menerapkan LCS dengan sendirinya, tanpa perlu diwajibkan oleh pemerintah.

Selubumnya, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengemukakan agar BI memberikan insentif bagi pengusaha yang menjalankan kebijakan penggunaan mata uang lokal (local currency settlement) LCS ini, seperti government to government (G2G) antara Indonesia dengan negara-negara tujuan ekspor dinilai sangat diperlukan. "Pendekatan G2G kami harap BI bisa melihat dari sisi itu, apakah ada insentif yang selain kita di penguasa lokal, juga penguasa negara asal ada manfaat. Jadi, dari government mereka yang memberikan insentif di negara asal LCS," ujar Wakil Ketua API Bidang Perdagangan Luar Negeri Nani Patricia Sutanto dalam acara 'Socialisasi Local Currency Settlement', beberapa waktu lalu. (ns)

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk Dan Entitas Anak. Jl. MT. Haryono Kav. No. 10, Cawang Jakarta 13340 - Indonesia. Telp. (021) 8508510, 8508520 & Fax (021) 8508506.

Financial statements for PT Waskita Karya (Persero) Tbk and its subsidiaries, including consolidated financial statements for the period ending 30 June 2021 and 31 December 2020.

Statement of changes in equity for PT Waskita Karya (Persero) Tbk and its subsidiaries for the period ending 30 June 2021 and 31 December 2020.

Jakarta, 24 September 2021 PT Waskita Karya (Persero) Tbk S.E & O Direksi